



KONFERENSI KEAMANAN MUNICH

Ketua Konferensi Keamanan Munich (MSC) Christoph Heusgen berbicara pada penutupan MSC ke-60 di Munich, Jerman, Minggu (18/2). Peserta dan pakar yang hadir pada Konferensi Keamanan Munich (MSC) yang baru saja selesai menyerukan peningkatan kerja sama internasional dalam bidang mengatasi tantangan global.

Mahkamah Internasional Sidangkan Legalitas Pendudukan Israel atas Palestina

Meskipun hasilnya tidak mengikat, sidang ini digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM di Jalur Gaza.

DEN HAAG(IM)- Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuka persidangan bersejarah pada Senin (19/2).

Persidangan dilakukan untuk membahas legalitas pendudukan Israel selama 57 tahun atas tanah yang diinginkan untuk negara Palestina, membuat 15 hakim mahkamah internasional terjun ke inti pusran konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun.

Sebanyak perwakilan dari 52 negara akan memaparkan bukti-bukti, momen yang belum pernah terjadi sebelumnya di pengadilan PBB tersebut.

Perwakilan dari Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok akan berbicara kepada majelis hakim dalam sesi yang digelar selama sepekan di Istana

Perdamaian yang juga markas pusat Mahkamah Internasional, Den Haag, Belanda.

Sidang ini merupakan permintaan dari Majelis Umum PBB yang pada Desember 2022 meminta Mahkamah untuk memberikan nasihat tidak mengikat mengenai konsekuensi hukum yang timbul atas kebijakan dan praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Meskipun hasilnya tidak mengikat, sidang ini digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM di Jalur Gaza.

Dilaporkan AFP, Minggu (18/2), Majelis Umum PBB meminta Mahkamah Internasional untuk mem-

perhatikan dua pertanyaan. Pertama, Mahkamah harus memeriksa konsekuensi hukum terhadap apa yang disebut PBB sebagai pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Ini berkaitan dengan pendudukan berkepanjangan, perluasan permukiman, dan pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, serta langkah-langkah yang bertujuan mengubah komposisi demografi, karakter, dan status Kota Suci Yerusalem.

Pada Juni 1967, Israel memenangkan Perang Enam Hari melawan beberapa negara Arab tetangga Palestina hingga merebut Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur, dan Yordania, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, dan Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir.

Israel kemudian mulai menduduki wilayah Arab yang direbut yakni seluas 70.000 km persegi itu.

PBB kemudian menyatakan pendudukan

wilayah Palestina oleh Israel adalah ilegal. Sejak itu, Mesir merebut kembali Sinai berdasarkan perjanjian damai Camp David yang diteken pada 1979 dengan Israel melalui perantara Amerika Serikat (AS).

Selain itu Mahkamah Internasional juga diminta untuk menilai konsekuensi dari apa yang digambarkannya sebagai penerapan undang-undang (UU) dan tindakan diskriminatif yang dilakukan Israel.

Kedua, Mahkamah harus memberikan nasihat mengenai bagaimana tindakan Israel memengaruhi status hukum pendudukan serta apa konsekuensinya bagi PBB dan negara-negara lain.

Pengadilan akan membuat keputusan soal kasus ini, kemungkinan pada akhir 2024.

Sidang ini juga tak terkait dengan tuntutan kasus genosida terhadap Israel atas serangan ke Gaza yang diajukan Afrika Selatan. Dalam putusan awal yang disampaikan bulan lalu, Mahkamah Internasional mendesak Israel melakukan

segala upaya untuk mencegah genosida serta mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk Gaza, meski tidak ada perintah untuk gencatan senjata.

Aturan-aturan ICJ terkait sidang perselisihan antar-negara dan keputusan-keputusannya bersifat mengikat, meskipun tidak ada upaya untuk mengeksekusinya. Dalam hal ini, pendapat yang disampaikan perwakilan 52 negara juga tidak mengikat. Namun semua pandangan yang disampaikan perwakilan negara akan dijadikan pertimbangan dalam memberikan nasihat kepada Majelis Umum.

ICJ sebelumnya telah mengeluarkan nasihat mengenai legalitas deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia pada 2008 dan pendudukan apartheid Afrika Selatan di Namibia. Mereka juga mengeluarkan nasihat pada 2004 yang menyatakan, bagian tembok yang didirikan oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal dan harus dirobohkan. ● tom

Serangan Kelompok Bersenjata Tewaskan 15 Orang di Kongo

KONGO(IM)- Sebanyak 15 orang dilaporkan tewas di provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo. Belasan korban itu tewas dalam serangan yang dilakukan kelompok bersenjata Cooperative for the Development of the Congo atau CODECO.

Serangan itu terjadi pada Sabtu (17/2) waktu setempat. Milisi CODECO mengincar warga dari suku saingannya, Hema.

"Pejuang CODECO menyergap pengguna jalan dekat desa Tali di mana mereka menghentikan 15 orang termasuk seorang wanita pada Sabtu sore," kata pemimpin masyarakat sipil wilayah Djugu, Jules Tsuba, dilansir AFP Senin (19/2).

Para anggota milisi CODECO mengikat dan melepaskan pakaian para korban. Jules mengatakan

korban mengalami luka di leher serta luka tembak.

"Beberapa korban 'digorok' lehernya. Yang lain ditembak mati," ujar Jules.

Ruphin Mapela, administrator wilayah tersebut, mengkonfirmasi jumlah korban tewas 15 orang. Serangan itu terjadi setelah berbulan-bulan perdamaian. CODECO termasuk di antara beberapa kelompok bersenjata Kongo yang menandatangani perjanjian damai tahun lalu setelah perundingan di Nairobi.

CODECO atau Cooperative for the Development of the Congo adalah salah satu dari banyak kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah kaya mineral yang bergolak tersebut. CODECO adalah milisi yang mengklaim melindungi komunitas Lendu dari kelompok etnis lain, Hema, dan tentara. ● ans

Meninggal di Penjara, Pemimpin Oposisi Rusia Disebut Kena Sindrom Kematian Mendadak

MOSKOW(IM)- Ibu dari tokoh oposisi ternama Rusia Alexei Navalny menyatakan, putranya telah dilaporkan meninggal akibat sindrom kematian mendadak. Jenazah Navalny belum diserahkan ke keluarga hingga penyelidikan penyebab tewasnya selesai.

Navalny, mantan pengacara berusia 47 tahun diketahui, jatuh pingsan dan meninggal pada Jumat (16/2) setelah berjalannya di lingkungan penjara di Kharp, sekitar 1.900 km timur laut Moskwa, tempat dia menjalani hukuman hingga tiga dekade.

Presiden AS Joe Biden memuji keberanian Navalny dan menuduh Presiden Vladimir Putin bertanggung jawab atas kematian tersebut. Sekutu AS, Inggris mengatakan akan ada konsekuensi bagi Rusia.

Kremlin mengatakan, reaksi Barat tidak dapat diterima, tetapi Putin belum mengomentari kematian Navalny. Ibu Navalny yang berusia 69 tahun, Ly-

udmila pada akhir pekan lalu mengunjungi kamp penjara tempat putranya tewas.

Dia mengaku, diberitahu kematian resmi putranya pada 16 Februari petang.

"Ibu Alexei yang didampingi pengacaranya tiba di kamp penjara tersebut pada Sabtu pagi. Mereka diberitahu bahwa penyebab kematian Navalny adalah sindrom kematian mendadak," kata direktur Yayasan Anti-Korupsi Navalny, Ivan Zhdanov.

Sindrom kematian mendadak adalah istilah yang tidak jelas untuk berbagai sindrom yang disebabkan serangan jantung mendadak dan kematian.

Lyudmila mengaku, tak tahu di mana jenazah putranya berada. Ia hanya diberi tahu petugas penjara, kalau jasad Navalny telah di bawa ke kota terdekat, Salekhard.

Para pendukung Navalny, termasuk pihak Barat, menyebut tokoh oposisi itu sebagai Nelson Mandela versi Rusia, yang suatu hari akan bebas dan memimpin negara tersebut. ● tom

Provinsi di Afghanistan Berlakukan Larangan Memotret dan Merekam Video Makhluk Hidup bagi Pejabatnya

KABUL(IM) - Otoritas provinsi Kandahar, Afghanistan pada Minggu (18/2), memerintahkan para pejabatnya untuk tidak mengambil gambar atau video dari makhluk hidup.

Dalam surat yang ditujukan kepada pejabat sipil dan militer, departemen dalam negeri provinsi tersebut mengarahkan mereka untuk menahan diri dari mengambil foto atau video makhluk hidup dalam pertemuan formal dan informal.

"Karena itu lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat," seperti dilaporkan oleh Straits Times, Minggu (18/2).

Surat itu menyatakan konten teks atau audio tentang kegiatan pejabat yang diperbolehkan.

Gambar manusia dan hewan umumnya dihindari dalam seni Islam, yang berlanjut untuk sebagian Muslim menjadi ketidaksukaan terhadap gambar-gambar makhluk hidup.

Jurubicara gubernur Kandahar mengatakan surat tersebut autentik dan bahwa instruksinya hanya berlaku untuk pejabat provinsi.

"Ia tidak berhubungan dengan masyarakat umum dan media independen," ujar Mahmood Azzam.

Televisi dan gambar makhluk hidup dilarang di bawah pemerintahan Taliban sebelumnya dari tahun 1996 hingga 2001.

Beberapa media telah menahan diri dari menggunakan gambar orang dan hewan sejak Taliban kembali berkuasa lebih dari dua tahun yang lalu.

Namun, departemen pemerintah pusat secara rutin mendistribusikan dan membagikan gambar pejabat senior yang bertemu dengan tokoh-tokoh asing.

Sikap umum Taliban terhadap representasi visual, khususnya fotografi dan video, tercatat konsisten selama bertahun-tahun.

Taliban dalam interpretasi agama, secara tradisional menyarankan dan dalam beberapa kasus melarang gambaran makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan.

Ketidaksukaan terhadap representasi visual ini berakar dalam interpretasi mereka terhadap ajaran agama, yang melarang keras penyebutan berhala dan pembuatan gambar yang bisa dianggap bersaing dengan yang ilahi.

Selama pemerintahan mereka sebelumnya di Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001, Taliban menerapkan pembatasan ketat terhadap berbagai bentuk media, termasuk fotografi, melarang televisi dan fotografi makhluk hidup, yang kemudian diperluas ke tampilan publik, karya seni, dan representasi visual lainnya.

Sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada pertengahan 2021, telah ada laporan yang menunjukkan kelanjutan pendekatan konservatif mereka terhadap media visual. Media, baik lokal maupun internasional, mengindikasikan ada peningkatan kehati-hatian dalam menampilkan gambar orang dan hewan, dan telah terjadi beberapa kali pembatasan terhadap jenis konten tertentu. ● tom

Korsel Bakal Perluas Telemedis Antisipasi Aksi Protes Dokter

SEOUL(IM) - Pemerintah Korea Selatan akan sepenuhnya memperluas layanan telemedis jika dokter berhenti dari pekerjaannya sebagai bentuk protes atas rencana pemerintah meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa kedokteran.

"Untuk memastikan pasien kronis dan ringan tidak menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas medis selama masa aksi kolektif, pemerintah berencana, sepenuhnya mengizinkan konsultasi medis non-kontak," kata Perdana Menteri Han Duck-soo dalam pertemuan darurat dengan para menteri terkait di Seoul, Senin (19/2).

Layanan telemedis di Korea Selatan atau metode pemberian layanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi telah diizinkan Korea Selatan sejak 2020.

Pada Desember 2023, pemerintah memperluas layanan telemedis kepada pasien yang pertama kali berkonsultasi di daerah terpencil pada malam hari dan hari libur.

PM Han juga menegaskan kembali rencana pemerintah untuk menetapkan total 409 rumah sakit dengan ruang gawat darurat untuk berada dalam mode siaga

darurat yang bertujuan untuk meminimalkan potensi gangguan dalam perawatan pasien darurat.

Sebanyak 2.700 dokter magang dan dokter residen di lima rumah sakit umum besar di Korea Selatan yang berperan penting dalam menyediakan perawatan medis kritis bersiap untuk mengagalkan pengunduran diri secara massal.

Aksi kolektif tersebut merupakan bagian dari protes terhadap keputusan pemerintah untuk menambah 2.000 kursi pada kuota pendaftaran mahasiswa kedokteran dari total 3.058 kursi yang sudah ada saat ini.

Para dokter dan mahasiswa kedokteran telah menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah tersebut dengan alasan bahwa jumlah dokter sudah mencukupi.

Hal ini membuat, peningkatan kuota mahasiswa kedokteran akan mengakibatkan perawatan medis yang tidak diperlukan.

Sementara itu pemerintah menentang aksi protes tersebut karena meningkatkan kekhawatiran akan kekosongan layanan kesehatan yang berdampak pada masyarakat dan berpotensi merugikan pasien darurat. ● tom

Argentina Ambruk, Angka Kemiskinan Capai 57,4% dan Tertinggi dalam 20 Tahun Terakhir

BUENOS AIRES(IM) - Tingkat kemiskinan di Argentina mencapai 57,4 persen pada Januari 2024 mencatat tingkat tertinggi setidaknya dalam 20 tahun terakhir, menurut laporan dari Universitas Katolik Argentina (UCA) yang dikutip oleh media lokal pada 18 Februari.

Observatorium Utang Sosial UCA yang bergengsi menyatakan kemiskinan mencapai 57 atau setara 27 juta orang kini dianggap miskin di Argentina sementara kemiskinan ekstrem 15%, atau sekitar tujuh juta orang.

Studi tersebut menyimpulkan bahwa kemiskinan meningkat dari 44,7 persen pada kuartal ketiga tahun 2023 menjadi 49,5 persen pada Desember 2023 dan menca-

pai 57,4 persen pada Januari 2024, "akibat kenaikan biaya bahan pokok dan penurunan pendapatan rumah tangga."

Studi tersebut menyoroti dampak devaluasi tajam peso pada Desember 2023, yang menyebabkan kenaikan harga, terutama pada bahan pokok dan pangan.

Menurut laporan, devaluasi mata uang peso yang dilakukan oleh Presiden Javier Milei segera setelah pelantikannya pada awal Desember, dan kenaikan harga yang diakibatkannya, memperparah tingkat kemiskinan, yang ditutup tahun 2023 sebesar 49,5 persen.

"Warisan sejati dari model kasta: Enam dari setiap 10 orang Argentina miskin," kata Milei, seorang libertarian, dalam posting media sosial

pada malam 17 Februari.

Milei menjabat dengan janji untuk "mendolarisasi" ekonomi, meredam laju inflasi tahunan yang melampaui 200 persen, menghapus defisit fiskal, dan mengakhiri manfaat bagi dinasti politik Argentina, yang disebut oleh Milei sebagai "kasta."

Pada Desember, pemerintahannya mencerpakan reformasi ekonomi besar-besaran, terutama devaluasi peso sebesar 54 persen terhadap dolar AS, menyebabkan pendapatan orang Argentina merosot seiring dengan melonjaknya harga.

Langkah-langkah lain termasuk pemotongan subsidi energi dan transportasi serta pengenaan kenaikan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal. ● ans



SERANGAN TENTARA ISRAEL DI KAMP PENGUNGGI

Kendaraan militer Israel terlihat selama operasi di Tulkarem, Tepi Barat bagian utara, pada Minggu (18/2). Pejabat Palestina dan Israel mengatakan, dua warga Palestina tewas dan seorang tentara Israel terluka parah dalam baku tembak saat Israel menyerang sebuah kamp pengungsi di Tepi Barat yang diduduki pada Minggu (18/2).